



PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Yulinda Ayu Reswari, Nazmel Nazir

Universitas Trisakti Jakarta

Email : yulinda023002018002@std.trisakti.ac.id ,
nazmel.nazir58@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2016 – 2020 terhadap laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan diungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan berupa pencatatan dan pengelolaan aset tidak berwujud dan persediaan yang belum tertib yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Public Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan

Metode: Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer metode kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel yaitu pejabat dan staf pengelolaan keuangan. Penelitian ini memiliki 44 sampel, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda.

Hasil: Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Public Governance* (X2) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) berpengaruh positif pada kualitas laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Y).

Kesimpulan: Penerapan standar akuntansi pemerintah, *Good Public Governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kementerian ketenagakerjaan.

Kata Kunci:

Akuntansi
Pemerintah;
*Good Public
Governance*;
Kualitas
Laporan
Keuangan;

ABSTRACT

Keywords:
Government
Accounting;
*Good Public
Governance*;
Government;
Quality of
Financial
Reports;

Background: In the 2016 – 2020 BPK RI Audit Results Report on the financial statements of the Ministry of Manpower, it was revealed that there are still problems in the form of recording and managing intangible assets and inventories that have not been orderly caused by weaknesses in internal control.

Objective: This study aims to determine the effect of the application of Government Accounting Standards, *Good Public Governance*, and Government Internal Control Systems on the quality of financial reports at the Ministry of Manpower.

Methods: The type of data used in this study is primary data with quantitative methods. Sampling in this study used a purposive sampling technique with sample criteria, namely officials and financial management staff. This study has 44 samples, hypothesis testing is done by using multiple linear regression test.

Results: The results of this study based on the results of the t test showed that the

application of Government Accounting Standards (X1), Good Public Governance (X2) and Government Internal Control Systems (X3) had a positive effect on the quality of the Ministry of Manpower reports (Y).

Conclusion: *The application of government accounting standards, Good Public Governance and government internal control systems affect the quality of financial reports at the ministry of manpower.*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan merupakan prasyarat normatif fundamental laporan keuangan pemerintahan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Kurniawan, 2016). Berdasarkan (Prihadi, 2019) Relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami merupakan syarat kualitas laporan keuangan pemerintah yang telah terstandardisasi. Menurut (Yuliani & Agustini, 2016) Kualitas laporan keuangan memiliki keeratan hubungan dengan standar akuntansi. Prinsip yang ada pada standar akuntansi digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah berkualitas yang berisi informasi keuangan yang akan dimanfaatkan oleh stakeholder dalam pengambilan suatu keputusan (Ikyarti & Aprilia, 2019). Pengertian *Good Public Governance* merupakan suatu tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa yang kondusif, responsif dan adaptif diwujudkan dengan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (Dhiyavani, Nasir, & Paulus, 2017). Dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia secara global diperlukan penerapan *Good Public Governance* (GPG) di sektor publik. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, bebas dari korupsi, bebas dari kolusi dan nepotisme serta jujur merupakan arah yang dituju dari pelaksanaan *Good Public Governance* (Hasthoro & Sunardi, 2016). Apabila tujuan *Good Public Governance* tercapai maka akan mendatangkan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah (Rifandi, 2019).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2016 – 2020 terhadap laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan diungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan berupa pencatatan dan pengelolaan aset tidak berwujud dan persediaan yang belum tertib yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020). Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai standar, peningkatan *Good Public Governance* dan peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan secara optimal dan menyeluruh. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 sebagai upaya menciptakan efektivitas dan juga efisiensi tata pemerintahan negara (Indonesia, 2008). Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan pemerintah, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan secara memadai (Latjandu, Kalangi, & Tinangon, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Public Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Prajitno, 2013). Sumber data penelitian ini berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada kantor pusat di Jakarta pada tahun 2022. Data yang digunakan untuk penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian yang berupa kuesioner yang akan diberikan pada responden. Populasi penelitian adalah pejabat dan staf pengelola

keuangan yang berada di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2022. Metode *purposive sampling* menjadi metode pilihan penulis dalam penelitian (Roflin & Liberty, 2021). Dalam metode *purposive sampling* ini, peneliti menentukan kriteria tertentu pada saat mengambil sampel dari populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 1

Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Status
	<i>Pearson Correlation</i> n=44-2=42, $\alpha = 5\%$		
1	0.335	0.2973	Valid
2	0.602	0.2973	Valid
3	0.473	0.2973	Valid
4	0.748	0.2973	Valid
5	0.695	0.2973	Valid
6	0.752	0.2973	Valid
7	0.689	0.2973	Valid
8	0.571	0.2973	Valid
9	0.355	0.2973	Valid
10	0.748	0.2973	Valid
11	0.736	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

Tabel 2

Uji Validitas Variabel *Good Public Governance*

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Status
	<i>Pearson Correlation</i> n=44-2=42, $\alpha = 5\%$		
1	0.687	0.2973	Valid
2	0.714	0.2973	Valid
3	0.782	0.2973	Valid
4	0.853	0.2973	Valid
5	0.682	0.2973	Valid
6	0.596	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

Tabel 3

Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Status
	<i>Pearson Correlation</i> n=44-2=42, $\alpha = 5\%$		
1	0.517	0.2973	Valid
2	0.481	0.2973	Valid
3	0.755	0.2973	Valid
4	0.754	0.2973	Valid

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Status
	<i>Pearson Correlation</i> n=44-2=42, $\alpha = 5\%$		
5	0.739	0.2973	Valid
6	0.643	0.2973	Valid
7	0.817	0.2973	Valid
8	0.726	0.2973	Valid
9	0.750	0.2973	Valid
10	0.740	0.2973	Valid
11	0.763	0.2973	Valid
12	0.759	0.2973	Valid
13	0.809	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

Tabel 4
Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Status
	<i>Pearson Correlation</i> n=44-2=42, $\alpha = 5\%$		
1	0.694	0.2973	Valid
2	0.626	0.2973	Valid
3	0.606	0.2973	Valid
4	0.781	0.2973	Valid
5	0.796	0.2973	Valid
6	0.802	0.2973	Valid
7	0.803	0.2973	Valid
8	0.830	0.2973	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS (Santoso, 2019)

b. Uji Reliabilitas

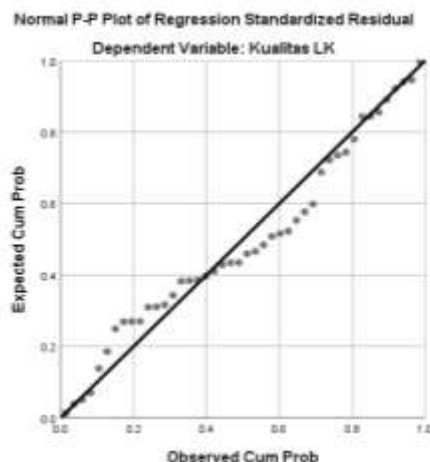
Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha (Hasil Uji SPSS 25)	Alpha	Status
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.832	0.7	Reliabel
<i>Good Public Governance</i>	0.815	0.7	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.916	0.7	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas



Gambar 2 Uji Normalitas

Tabel 6
 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Tingkat Signifikansi Hasil Uji SPSS 25	$\alpha = 0.05$	Keterangan
0.200	0.05	Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

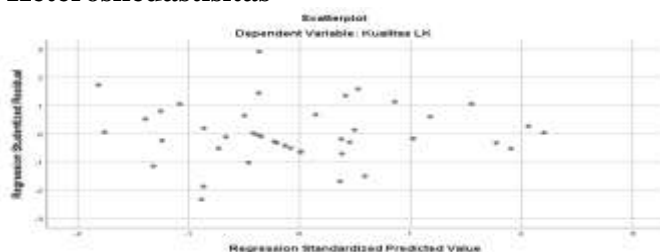
2) Uji Multikolinearitas

Tabel 7
 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Penerapan SAP (X_1)	0.505	1.980	Tidak terjadi multikolinearitas
GPG (X_2)	0.591	1.691	Tidak terjadi multikolinearitas
SPIP (X_3)	0.408	2.450	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 uji Heteroskedastisitas

4) Uji Hipotesis Penelitian

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

R²	Adjusted R²
0.705	0.682

Berdasarkan tabel di atas besarnya adjusted R2 adalah 0,682 hal ini berarti sebesar 68,2% variasi kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Public Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sedangkan sisanya sebesar (100%-68,2% = 31,8%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Dalam penelitian ini, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R2 karena nilai adjusted R2 dapat naik turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Jika menggunakan R2 saja terdapat kelemahan yaitu setiap bertambah satu variabel independen, nilai R2 pasti akan meningkat sehingga hasilnya tidak konsisten dalam model (Kusumo & Subekti, 2014).

b) Uji F

Tabel 9
Uji F

F hitung	F tabel	Sig (Hasil Uji SPSS 25)	$\alpha =$ 0.05
31.789	2.83	0.000	0.05

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 31.789 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung > F tabel F(k;n-k), Diketahui n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel X maka nilai F tabel sebesar 2.83 maka 31.789 > 2.83 sehingga hasil ini dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan atau dapat dikatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Public Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Nurillah & Muid, 2014).

c) Uji t

Tabel 10 Uji t

Variabel	Prediksi Arah	Unstandardized Coefficient	t hitung	t tabel	Sig (2tailed)	Sig (1tailed)
B						
Constant: 0.118						
Penerapan SAP (X ₁)	Positif	0.215	2.090	2.021	0,043	0,0215
GPG (X ₂)	Positif	0.433	2.599	2.021	0,013	0,0065
SPIP (X ₃)	Positif	0.230	3.135	2.021	0,003	0,0015

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (Santoso, 2019)

5) Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil uji regresi, didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,118 + 0,215X_1 + 0,433X_2 + 0,230X_3 + e$$

Penjelasan atas persamaan di atas adalah sebagai berikut:

Y = Kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan

X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X2 = *Good Public Governance*

X3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

e = standard error

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan
Berdasarkan uji t (t-test), variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Y), sehingga membuktikan bahwa H1 diterima.
2. Pengaruh *Good Public Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan
Berdasarkan uji t (t-test), variabel *Good Public Governance* (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Y), sehingga membuktikan bahwa H2 diterima.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan
Berdasarkan uji t (t-test), variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Y), sehingga membuktikan bahwa H3 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan; *Good Public Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kementerian Ketenagakerjaan

BIBLIOGRAFI

- Dhiyavani, Siti Indah, Nasir, Azwir, & Paulus, Sem. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. Riau University.
- Hasthoro, Handoko A., & Sunardi, Sunardi. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 53–68.
- Ikyarti, Tri, & Aprilia, Nila. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kurniawan, Indra Suyoto. (2016). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 47–58.
- Kusumo, Yuro Bimo, & Subekti, Imam. (2014). relevansi nilai informasi akuntansi, sebelum adopsi IFRS dan setelah adopsi IFRS pada perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Latjandu, Imelda, Kalangi, Lintje, & Tinangon, Jantje J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 98–109.
- Nurillah, As Syifa, & Muid, Dul. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok). *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Prajitno, Subagio Budi. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. *Jurnal*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. (Tersedia Di [Http://Komunikasi.Uinsgd.Ac.Id](http://Komunikasi.Uinsgd.Ac.Id)).
- Prihadi, Toto. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Kajian Akuntabilitas. (2020). Kajian Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara-Badan Keahlian DPR RI.
- Rifandi, Zaizar Wiet. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 1–17.
- Roflin, Eddy, & Liberty, Iche Andriyani. (2021). Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran. Penerbit NEM.
- Santoso, Singgih. (2019). Menguasai SPSS versi 25. Elex Media Komputindo.
- Yuliani, Nur Laila, & Agustini, Rahmawati Dwi. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).